



## ► KECURANGAN PPDB

# Warga Menolak Modus Nebeng Alamat

*Triyo Handoko & Abdul Hamid Razak*  
*redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Warga di sekitar sekolah negeri di Kota Jogja ikut mengantisipasi kecurangan yang muncul dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan nebeng alamat.

Warga RW 06, Kelurahan Terban, Kota Jogja, contohnya. Mereka membuat kesepakatan bersama untuk mengantisipasi modus mengakali ketentuan regulasi PPDB, terutama terkait dengan domisili. Kesepakatan warga tersebut yakni berupa pelarangan warga menerima anggota keluarga baru untuk kepentingan seleksi zonasi PPDB.

### Warga Menolak...

Kesepakatan diambil mengingat RW 06 dekat dengan berbagai sekolah, misalnya, SMPN 5 Jogja, SMPN 1 Jogja, dan SMAN 6 Jogja.

Ketua RW 06, Ardian Listyono, menjelaskan alasan kesepakatan diambil untuk memberi kesempatan lebih luas pada peserta didik warga setempat. "Awla-awal PPDB itu banyak yang *nebeng* terus bikin anak-anak warga kami yang sulit dapat sekolah, maka kami bikin kesepakatan itu," jelasnya, Minggu (19/6).

Ardian menyebut tahun ini tak ada laporan warga yang mengeluhkan adanya pendomplengan alamat untuk seleksi zonasi PPDB. "Kalau tahun ini sudah tidak ada," katanya.

Namun, Adrian tak dapat memastikan hal tersebut karena proses migrasi warga langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jogja. "Jadi kalau sekarang ada warga masuk itu tidak lewat RT dan RW, kami hanya diberitahu saja di akhir jika ada warga yang masuk," ujarnya.

Tahun ini, kata Adrian, ada beberapa warga yang masuk ke RW-nya. Tapi, ia tak bisa memastikan tujuannya PPDB atau tidak. "Sulit juga kalau ada yang masuk kami harus tanya tujuannya apa, seperti tak etis juga," kata Adrian.

Baginya yang terpenting kuota untuk warganya yang mengikuti PPDB terpenuhi sudah cukup.

Kesepakatan serupa juga dibuat warga RW 03, Kelurahan Kotabaru. Ketua RW 03 Sutarto menyebut warganya tak berkenan adanya pendomplengan alamat di wilayahnya hanya untuk PPDB. "Kalau soal kuota memang belum

pernah ada masalah, anak-anak di sini selalu dapat sekolah," ujar Sutarto.

Namun, pendomplengan alamat untuk PPDB membuat warganya tak berkenan. "Kalau jadi warga sini menggunakan alamat sini harus ikut kontribusi juga bukan hanya untuk untungnya sendiri seperti lolos PPDB," jelasnya.

Sutarto menyebut awal diberlakukannya PPDB, tiga tahun silam, banyak yang mendompleng alamat di RW-nya untuk lolos PPDB. "Tapi kami juga tidak bisa apa-apa, karena itu kewenangan Disdukcapil yang memberikan izin," ujarnya.

Sutarto berharap agar Disdukcapil turut memverifikasi jika ada warga yang pindah. "Paling tidak tanya ke RT atau RW apa benar yang bersangkutan tinggal di situ, jadi kami juga bisa memantau," katanya.

### Minim Laporan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Sri Adi Marsanto memastikan pelaksanaan PPDB di Sleman pada tahun ajaran 2022/2023 berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Hal ini terlihat dari minimnya jumlah laporan ataupun aduan yang masuk ke Posko PPDB di Disdik Sleman. Meski minim aduan, bukan berarti tidak ada warga yang datang ke Posko. Posko PPDB Sleman, katanya, tetap menerima warga yang datang tetapi bukan memprotes tetapi lebih pada konsultasi. "Kalaupun ada yang datang setiap hari antara 5-10 orang. Itu pun didominasi oleh warga yang konsultasi atau bertanya

terkait pembuatan akun. Bukan terkait hal-hal yang signifikan," katanya, Sabtu (18/6).

Minimnya aduan dan protes yang diterima Posko PPDB Sleman, lanjut Sri, disebabkan sejumlah hal. Selain sosialisasi pelaksanaan PPDB sudah cukup masif, bisa jadi persoalan yang muncul selama proses PPDB dapat diselesaikan di tingkat UPT Pelayanan Pendidikan masing-masing kapanewon.

"Ini juga menunjukkan warga sudah banyak memahami pelaksanaan PPDB. Apalagi tahun ini kami buat tahapan dari afirmasi hingga zonasi di akhir," ujarnya.

Disinggung soal potensi kecurangan dengan modus calon siswa pindah KK agar lebih dekat atau masuk zonasi, Sri meyakini hal tersebut akan mudah terdeteksi oleh sistem. Ia menjelaskan, Disdik sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sleman untuk mengantisipasi masalah tersebut. "Kalau ada yang tidak sesuai dengan persyaratannya, akan terdeteksi oleh sistem. Sistem tentu akan menolak jika memang KK yang dimasukkan tidak sesuai dengan aturan," katanya.

Disdik masih menunggu selesainya seluruh proses PPDB di Sleman. Untuk PPDB SD, lanjut Sri, Disdik segera menggelar rapat terkait dengan capaian PPDB. Termasuk membuat kebijakan terhadap sekolah-sekolah yang hanya menerima siswa baru dengan jumlah minim. "Kami masih belum menerima rekapitulasi penerimaan PPDB SD. Tentu nanti akan ada kebijakan terhadap sekolah yang jumlah siswa barunya sedikit," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005